

Kerajaan Turungeng di Sinjai: Sejarah, Politik, dan Intervensi Kolonial

Musdalifah¹, M. Dahlan M², Syamzan Syukur³

^{1,2,3}, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: musdalifaifha248@gmail.com¹, dahlanmuhammad1954@gmail.com², syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 13 September 2025

Revised: 01 November 2025

Accepted: 19 November 2025

Keywords:

Kerajaan
Turungeng; Sinjai; Federasi
Pitulimpoe; Kolonialisme;
Historiografi Sulawesi
Selatan

Abstrak: Penelitian ini menelaah Kerajaan Turungeng sebagai pusat kekuasaan lokal di Sinjai dengan tujuan mengungkap perannya dalam konfigurasi politik, sosial, dan budaya Sulawesi Selatan. Fokus diarahkan pada rekonstruksi sejarah, struktur pemerintahan, dinamika hubungan dengan kerajaan besar, serta dampak kolonialisme terhadap eksistensi Turungeng. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian sejarah, berbasis data primer dan sekunder berupa naskah lontara, arsip kolonial, literatur ilmiah, serta wawancara. Analisis dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan historis, antropologis, sosiologi agama, dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Turungeng merupakan kerajaan pertama di federasi Pitulimpoe, terbentuk melalui legitimasi To Manurung dan didominasi oleh kepemimpinan perempuan. Struktur pemerintahannya melibatkan Arung, Sullewatang, dan Gellarang, yang memperlihatkan sistem kekuasaan berbasis adat. Hubungan politik Turungeng dengan Gowa dan Bone mencerminkan posisi strategis Sinjai sebagai wilayah perbatasan. Intervensi kolonial Belanda pada abad ke-19 menandai fase krusial yang menghapus Turungeng dari peta politik lokal, namun resistensi masyarakat memperlihatkan pola solidaritas antarkerajaan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya Turungeng sebagai representasi kearifan lokal dan basis identitas budaya Sinjai. Implikasi studi menekankan urgensi revitalisasi sejarah lokal dalam rangka memperkuat kesadaran historis dan memperkaya diskursus historiografi Nusantara.

PENDAHULUAN

Sejarah berperan sebagai medium penting dalam memahami identitas kolektif, dinamika

sosial, serta proses transformasi budaya suatu masyarakat. Kajian historis tidak sekadar menguraikan rangkaian peristiwa kronologis, melainkan juga menelusuri relasi sebab-akibat yang membentuk kehidupan manusia di masa lalu hingga berimplikasi pada perkembangan peradaban masa kini (Muqowin & Maharsi, 2010). Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap sejarah lokal memiliki urgensi besar mengingat keberagaman etnis, budaya, dan sistem politik tradisional yang menyimpan kearifan sekaligus menjadi basis konstruksi identitas. Pengabaian terhadap sejarah berpotensi menimbulkan krisis identitas, sebagaimana ditegaskan bahwa pengabaian terhadap sejarah akan mengakibatkan amnesia dan hilangnya identitas diri (Madjid & Wahyudhi, 2014). Oleh sebab itu, penelitian historis terhadap kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kerajaan Turungeng di Sinjai, menawarkan kontribusi signifikan dalam memperkuat identitas budaya serta memperkaya khazanah keilmuan tentang proses islamisasi di Sulawesi Selatan abad XVII–XIX M.

Kajian sejarah lokal di Sulawesi Selatan telah memperoleh perhatian luas dari sejumlah peneliti. Christian Pelras (2021) membahas perjalanan masyarakat Bugis mulai dari proto-sejarah hingga modernitas, dengan menekankan konsep *To Manurung* sebagai basis legitimasi politik. Mattulada (1985) menguraikan pola antropologi politik masyarakat Bugis dengan menekankan nilai, struktur sosial, serta hierarki kekuasaan tradisional. Muhannis (2013) menyoroti peran adat dan figur pemimpin tradisional sebagai penjaga identitas masyarakat. Suriada Mappangara dan Irwan Abbas (2003) menjelaskan dinamika penerimaan dan pelebagaan Islam di kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas Kerajaan Turungeng secara rinci. Studi-studi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara mendalam menyingkap aspek internal Turungeng, sehingga menyisakan ruang analisis kritis untuk mengkaji peran politik, ekonomi, serta hubungan eksternal kerajaan tersebut.

Upaya ilmiah lain juga muncul dalam penelitian Wahyu (2024) mengenai transformasi federasi Tellulimpoe dan Pitulimpoe ke dalam struktur administratif Kabupaten Sinjai serta penelitian Muh. Anis (2018) terkait penerimaan Islam di Sinjai abad XVII. Keduanya memberikan gambaran umum mengenai integrasi Islam dan perubahan sosial-politik, namun tidak secara mendalam menguraikan eksistensi Kerajaan Turungeng sebagai entitas politik penting dalam federasi Pitulimpoe. Literatur tersebut lebih banyak menitikberatkan pada proses islamisasi Sinjai secara umum, sehingga analisis mengenai Turungeng sebagai locus kajian tetap terbuka dan relevan untuk ditelaah.

Penelitian ini bertujuan menguraikan Kerajaan Turungeng sebagai pusat kekuasaan lokal dengan menekankan dimensi sejarah, politik, dan intervensi kolonial yang membentuk identitas serta dinamika masyarakat di Sinjai. Kebaruan penelitian terletak pada fokus eksplisit terhadap Turungeng sebagai entitas historis yang sebelumnya belum menjadi objek kajian utama. Dengan menyoroti hubungan politik dengan kerajaan lain, struktur internal kekuasaan, serta dampak kolonialisme, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur mengenai posisi strategis Turungeng dalam konfigurasi kekuasaan lokal Sulawesi Selatan. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa posisi Turungeng sebagai pusat kekuasaan lokal memungkinkan terbentuknya pola politik yang tidak hanya berakar pada legitimasi tradisional, melainkan juga dipengaruhi oleh arus islamisasi dan tekanan kolonial. Pola ini membentuk adaptasi politik, ekonomi, dan sosial yang khas serta menjadi penentu keberlangsungan kerajaan dalam menghadapi perubahan zaman. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis struktur hierarki kekuasaan, hubungan politik dengan kerajaan lain di sekitar Sinjai, dinamika ekonomi, serta intervensi kolonial yang memengaruhi tatanan kekuasaan Turungeng. Dengan kerangka demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman historiografi lokal dan memperkaya perspektif mengenai

peran kerajaan kecil dalam dinamika Islamisasi dan kolonialisme di Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian sejarah yang menelaah kembali peristiwa masa lampau melalui data akurat dan fakta historis (More, 2023). Fokus utama penelitian diarahkan pada Kerajaan Turungeng dengan menelusuri dinamika kekuasaan dan proses Islamisasi di Sinjai abad XVII–XIX M. Sumber penelitian didominasi oleh literatur atau library research berupa buku, laporan penelitian, artikel, lontara, dan naskah, namun tetap terbuka pada sumber lisan. Untuk menganalisis objek kajian, digunakan beberapa pendekatan, yakni historis, antropologi, sosiologi agama, dan politik. Pendekatan historis menekankan pembuktian fakta masa lampau sebagai dasar pengetahuan generasi berikutnya (Prabakaran, 2023; Prayogi & Nasrullah, 2024). Pendekatan antropologi difokuskan pada kajian masyarakat dan kebudayaan dalam memahami transformasi sosial dan budaya di Kerajaan Turungeng (Abdurrahman, 2011; Demeshchenko, 2021; Martin, 2022). Pendekatan sosiologi agama digunakan untuk menganalisis praktik keagamaan masyarakat pasca masuknya Islam (Day, 2020). Sementara itu, pendekatan politik membantu mendeskripsikan struktur kekuasaan, hierarki, serta relasi politik antar-kerajaan (Fazal, 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi empat tahapan. Pertama, heuristik yang berfokus pada penemuan, klasifikasi, dan penanganan catatan sejarah, baik di museum, perpustakaan, maupun koleksi pribadi (Savolainen, 2017). Kedua, kritik sumber, yakni verifikasi keabsahan melalui kritik internal dan eksternal. Kritik internal menelaah substansi, bahasa, konteks, serta ide dalam dokumen sejarah, sedangkan kritik eksternal menilai keaslian bahan, identifikasi tulisan, serta kondisi fisik dokumen (Oelofse, 2011). Ketiga, interpretasi sebagai upaya memahami faktor-faktor penyebab suatu peristiwa dengan membandingkan data agar tidak terjebak pada kesimpulan tunggal, sebab peristiwa sejarah dapat menghasilkan akibat beragam (Abdurrahman, 2011; Bateman & Teele, 2020). Keempat, historiografi sebagai tahap penulisan hasil penelitian sejarah yang harus disusun sesuai prosedur ilmiah, sistematis, argumentatif, serta berbasis bukti yang detail dan akurat (Lim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Kerajaan Turungeng

Sejarah terbentuknya wilayah Sinjai tidak dapat dilepaskan dari peran federasi kerajaan-kerajaan lokal yang memiliki karakteristik berbeda namun tetap berada dalam satu ikatan persekutuan. Federasi Kerajaan Tellulimpoe terdiri atas tiga kerajaan pesisir, yakni Tondong, Bulu-Bulu, dan Lamatti, sedangkan federasi Kerajaan Pitulimpoe meliputi tujuh kerajaan di kawasan pegunungan kaki Gunung Bawakaraeng, yaitu Turungeng, Manipi, Pao, Suka, Balasuka, Terasa, dan Manimpahoi (Mustafa & Tungke, 2002). Meskipun terhimpun dalam satu federasi, masing-masing kerajaan tetap menjalankan pemerintahan secara otonom tanpa menimbulkan pertentangan atau peperangan. Dalam lingkup Pitulimpoe, Kerajaan Turungeng memiliki kedudukan istimewa karena menjadi kerajaan pertama yang berdiri sekaligus menjadi induk bagi enam kerajaan lainnya. Proses berdirinya sebuah kerajaan tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan kesadaran kolektif serta dukungan masyarakat. Menurut Bakhlov dan Bakhlova (2018), keberadaan kerajaan harus ditelusuri dari kondisi sosial pada masa lampau, di mana kehidupan manusia masih berpola nomaden sebelum akhirnya mengalami perkembangan pemikiran hingga menetap dan membangun permukiman (Hamid et al., 2002a). Dengan demikian, pembentukan kerajaan di wilayah Sinjai mencerminkan evolusi sosial masyarakat dari pola hidup berpindah menuju organisasi politik yang lebih

terstruktur.

Kepercayaan masyarakat Bugis mengenai asal mula peradaban sebelum berdirinya kerajaan pada abad ke-11 hingga abad ke-13 M tercermin dalam kisah I Lagaligo. Kosmologi Bugis menggambarkan keterhubungan antara dunia atas (langit) dan dunia bawah (pertiwi) yang melahirkan dunia tengah (bumi) sebagai simbol keserasian. Pertemuan dua sisi yang berlawanan, seperti terang dan gelap atau atas dan bawah, dimaknai sebagai kekuatan penyeimbang yang saling membutuhkan demi tercapainya tujuan hidup. Keselarasan ini dipandang sebagai nilai utama yang menjaga keseimbangan dunia dan membentuk tatanan kehidupan manusia. Dalam narasi tersebut, Sawerigading menempati posisi sentral sebagai tokoh penghubung kekerabatan lintas etnis di Sulawesi serta dianggap sebagai pendiri peradaban atau *culture hero*. Sawerigading dihormati sebagai pionir penguasa di kalangan Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kisah tentang Sawerigading tersebar dalam bentuk tradisi lisan yang bersifat sakral dan hanya disampaikan pada kesempatan tertentu. Di Sulawesi Selatan, narasi ini terdokumentasi dalam Lontara, khususnya naskah *Sure' Galigo*, yang mengabadikan peran Sawerigading dalam sejarah peradaban Bugis (Mattulada, 1998).

Setelah Sawerigading dan keluarganya kembali ke Pertiwi di *Urilliu'* atau *Toddang-Tojang*, penduduk dunia mengalami kekosongan pemimpin sehingga kondisi di dunia menjadi sepi dan kacau antara kaum *Anang*. Setiap kelompok merasa bebas untuk menyerang dan di serang oleh kelompok lainnya. Situasi yang kacau ini berlangsung sangat lama dan kelompok-kelompok yang tinggal di daerah pesisir dan muara Sungai semakin berkembang. Masing-masing kaum yang di sebut *Anang* mulai membangkitkan kembali semangat persatuan mereka dan mengisolasi kaumnya masing-masing. Mereka memilih tempat tinggal yang jauh dari gangguan kelompok lain. Setiap kelompok *Anang* selalu berhati-hati terhadap serangan dari kelompok *Anang* lainnya atau secara sukarela bergabung dengan Persekutuan *Anang* yang lebih unggul, baik dalam hal kekayaan maupun kebijaksanaan. Hal ini mengarah pada pembentukan kelompok yang lebih besar dengan Upaya mencari sosok pemimpin yang dapat menyatukan Persekutuan antar *Anang* menjadi sebuah Kumpulan yang lebih besar dari beberapa kelompok *Anang* yang sejenis.

Sawerigading dapat dipandang sebagai tokoh sentral yang berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Sulawesi karena kemampuannya menjembatani hubungan antar berbagai suku serta menjadi simbol peradaban dan pahlawan budaya. Sawerigading di Sulawesi Selatan dihormati sebagai pendiri dinasti para penguasa Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, sementara kisah hidupnya diwariskan secara sakral melalui tradisi lisan dan dalam bentuk tertulis melalui naskah Lontara yang dikenal sebagai *Sure' Galigo* atau *I Lagaligo*. Setelah Sawerigading dan keluarganya kembali ke Pertiwi di *Urilliu'* atau *Toddang-Tojang*, masyarakat menghadapi kekosongan kepemimpinan yang menimbulkan suasana kacau akibat konflik antarkelompok *Anang*. Situasi tersebut memperlihatkan dinamika sosial yang ditandai oleh persaingan, isolasi kelompok, serta upaya bertahan dari serangan lawan, meskipun pada saat yang sama komunitas pesisir dan muara sungai mengalami perkembangan pesat. Kondisi ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk mencari pemimpin yang mampu menyatukan kelompok *Anang* melalui kekuatan ekonomi, kebijaksanaan, maupun legitimasi sosial, sehingga lahir struktur persekutuan yang lebih besar sebagai embrio bagi lahirnya sistem sosial-politik di Sulawesi (*Sure' Galigo*).

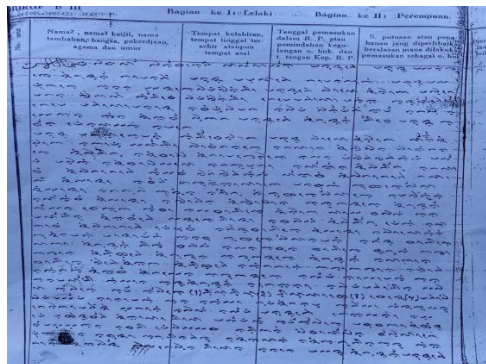
Kekosongan kepemimpinan pasca kembalinya Sawerigading ke Pertiwi menimbulkan kekacauan di kalangan kelompok *Anang* dan memperlihatkan urgensi peran pemimpin dalam menjaga stabilitas sosial. Kondisi tersebut mendorong kelompok *Anang* untuk mengisolasi diri sekaligus membangkitkan semangat persatuan sebagai respons terhadap dinamika sosial yang kompleks. Pencarian pemimpin luar biasa dari luar masyarakat *Anang* melahirkan persekutuan

yang lebih besar dengan cakupan wilayah luas, biasanya berlokasi di daerah strategis yang mendukung aktivitas ekonomi melalui *Akkayang* (kehidupan di laut), *Allaong-rumang* (pertanian), dan *pasa'marowa* (perdagangan). Ketiga elemen ini menjadi fondasi terbentuknya negeri besar dan kokoh, meskipun tetap memerlukan figur pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat serta menjamin perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Konsep kepemimpinan yang lahir, dikenal dengan Kedatuan *To Manurung*, mencerminkan gagasan kepemimpinan unggul yang visioner dan efektif dalam mewujudkan negeri kuat, harmonis, serta sejahtera (Mattulada, 1998).

Konsep *To Manurung* lahir dalam konteks sosial yang diliputi kecemasan dan ketakutan, berfungsi sebagai landasan untuk menata ulang kehidupan masyarakat yang terpecah menuju suatu tatanan baru. Kehadirannya tidak hanya dipahami sebagai figur penyelamat, melainkan juga sebagai simbol integrasi politik yang menghubungkan berbagai kelompok dalam satu komitmen menjaga perdamaian dengan menjadikannya pemimpin utama (Mattulada, 1998). Pemikiran mengenai *To Manurung* berkembang seiring gagasan kenegaraan yang mencakup wilayah lebih luas, menegaskan legitimasi kepemimpinan berbasis pada kepercayaan kolektif. Penulisan sejarah Sulawesi Selatan menekankan bahwa penguasa awal kerajaan, baik laki-laki maupun perempuan, sering digambarkan sebagai *To Manurung*, yakni sosok yang turun dari langit, atau *To Tompo'*, sosok yang muncul dari bawah, keduanya dipandang sebagai keturunan dewata yang diutus untuk mengakhiri kekacauan pasca-kisah La Galigo (Pelras, 2021).

Kerajaan Turungeng dikenal sebagai kerajaan pertama di Kabupaten Sinjai dan keberadaannya telah tercatat sejak sekitar abad ke-15. Sebelum lahirnya federasi kerajaan di wilayah tersebut, telah berdiri lima kerajaan, salah satunya Turungeng, yang kehadirannya diperkuat dengan adanya bukti berupa emba atau tempat ritual dan makam leluhur (Komunitas Tobonga, 2021). Kerajaan ini terbentuk melalui hadirnya beberapa *To Manurung*, antara lain Tanri Baru, Besse Padang, Besse Padang Cilibboj, dan Besse Gowa. Kehadiran *To Manurung* di Turungeng tidak terlepas dari eksistensi komunitas awal di wilayah Terasa yang berbatasan langsung, terdiri atas keturunan Raja Bone III, La Saliyu Karampelua (1368–1470), yang menggantikan pamannya, Raja Bone II La Ummase, sejak usia satu hari. Dalam menjalankan kepemimpinan, La Saliyu didampingi oleh seorang *To Sulle* yang berperan sebagai *Makkedang* Tana atau *To Sulewakka* dengan fungsi menyerupai perdana menteri. Meskipun demikian, Terasa pada periode tersebut belum memiliki raja definitif, melainkan hanya komunitas anang dari keluarga La Saliyu Karampelua, bukan *karaeng* atau *arung*. Kondisi ini membuka peluang bagi Turungeng untuk menegaskan posisinya sebagai pusat kekuasaan pertama di Sinjai melalui kepemimpinan *To Manurung* Tanribaru atau Tenriawaru (Muhannis, 2022).

Gambar 3. 1 Naskah Lontara *To Manurung* pertama di Kerajaan Turungeng



Sumber: Seminar Muhannis “Kerajaan Turungeng di Sinjai” pada tahun 2018

Cikal bakal adanya *Akkarungeng* di Sinjai mulai muncul sekitar abad XII atau XIII. Menurut naskah Lontara di atas mengatakan bahwa *To Manurung* pertama di Turungeng Bernama Tanribaru dan tidak menikah kemudian menghilang. *To Manurung* kedua Bernama Besse Padang Cilibbo yang kemudian bertemu dengan karaeng Langnge-langnge dari Bulukumba kemudian lahirlah seorang anak yang Bernama Besse Manurung yang kemudian tidak menikah. Kemunculan *To Manurung* ke tiga Bernama Basse Gowa. *To Manurung* menyusuri *Pocci Tanaya* dan muncul di Pabbettu. Pada saat kedatangannya banyak Masyarakat yang tidak setuju karena mereka berpendapat mengapa *To Manurung* disembah padahal *To Manurung* juga manusia. *To Manurung* lalu menghilang lalu muncul di Pattontongang, kemudian menghilang lagi dan muncul di Korong. Dari Korong *To Manurung* lari ke *Turungeng* tapi tidak di temukan. Selang berapa lama kemudian baru di temukan oleh seekor anjing berada di Lembah *Bonto Salama* di sebuah sumur yang terletak di Turungang (Komunitas Tobonga, 2021). Muhannis mengatakan dalam seminarnya pada 2018:

“oleh orang tuanya mengatakan: *naung mako mae ana na nu anjari karaeng ko anne mae ri turungang* (turunlah kamu anakku untuk menjadi Raja di Turungang)”

Kepemimpinan awal di Turungeng berawal dari perintah orang tua kepada putranya untuk menjadi raja, namun ia menolak hingga dibujuk oleh ade' eppa, yakni Ade' Bulutana, Ade' Bululohe, Ade' Serang, dan Ade' Mangopi. Setelah persetujuan tercapai, ia bersedia memimpin dengan syarat dibuatkan istana. Keterbatasan alat dan bahan untuk membangun istana diatasi oleh pemberian Besse Gowa berupa sebuah benda menyerupai pisau lipat modern, sehingga berdirilah istana Turungeng. Pada masa pemerintahannya terbentuk sepuluh dewan adat, antara lain Macowa Panyny, Macowa Moge, Galarang Paru, Galarang Sanang, Macowa Colo, Macowa Kambilang, Macowa Hama, Macowa Rampang, Macowa Toci, dan Galla Borong (Komunitas Tobonga, 2021).

Perkembangan berikutnya ditandai dengan pernikahan seorang putra Raja Tallo yang tengah berburu dengan *To Manurung* Turungeng atas permintaan masyarakat. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama La Tenri Waru, yang kelak menggantikan ibunya sebagai pemimpin Turungeng. La Tenri Waru menikah dengan Raja Bone dan dikaruniai tujuh anak, terdiri atas enam laki-laki dan satu perempuan (Anis, 2018a). Putri tunggalnya kemudian mewarisi kepemimpinan di Turungeng, sedangkan enam putranya memimpin kerajaan lain yang tergabung dalam federasi Pitulimpoe, yaitu Manimpahoi, Manipi, Terasa, Suka, Balasuka, dan Pao. Penyusunan daftar Arung Turungeng diawali oleh *To Manurung* Tenriawaru, dilanjutkan oleh Baco Paocani Daeng Patenreng, Besse Koppe, Besse Petta Emba, Besse Turungang, Datu Sadapotto, Rajuna (yang pertama kali memeluk Islam), I Cellak Daeng Matajang, I Cella Daeng Manurung, Syambangeng Daeng Sijerra, I Jamila, Raknang, Malluluang Daeng Parani, To Maeppe Daeng Situncu, Pacellai Daeng Ripakja, Supu Daeng Paroto, hingga Tenriliwang (Muhannis, 2022). Data tersebut belum sepenuhnya lengkap akibat keterbatasan akses terhadap naskah Lontara. Penutup sejarah Kerajaan Turungeng terjadi pada 1 Agustus 1862 ketika kerajaan resmi dihapus dan Besse Rameng dilantik sebagai Arung Manipi ke-10. Berdasarkan wawancara dengan Abidin Wakur:

“Turungeng rata-rata di pimpin oleh seorang wanita, di mulai dari Raja pertamanya, kemudian di teruskan oleh anak-anaknya yang juga seorang wanita. Akan tetapi, Turungeng juga pernah di pimpin oleh seorang laki-laki”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kepemimpinan di Kerajaan Turungeng didominasi oleh perempuan. Kronik sejarah menunjukkan pola kesinambungan

tersebut, mulai dari *To Manurung* pertama yang ditemukan berwujud perempuan, dilanjutkan oleh putrinya, hingga generasi ketiga yang juga dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan ketika Kerajaan Turungeng dihapus dan dialihkan ke Manipi, kepemimpinan tetap berada di tangan perempuan. Tradisi ini memperlihatkan konstruksi sosial dan legitimasi politik yang menempatkan perempuan sebagai figur sentral dalam struktur kekuasaan lokal. Jejak historis tersebut tidak hanya tersimpan dalam narasi lisan, tetapi juga pada situs-situs budaya yang masih dijaga masyarakat. Sumur tempat ditemukannya *To Manurung* I di Desa Turungan Baji masih berfungsi sebagai ruang ritual, digunakan masyarakat untuk meminum air dan mandi, dengan kondisi yang telah dipelihara melalui pembangunan tembok pelindung. Sekitar 50 meter dari sumur itu terdapat batu yang dikeramatkan dan diyakini sebagai peninggalan Turungeng. Batu tersebut ditempatkan dalam sebuah bangunan kecil yang kokoh dari tembok dan semen dengan lantai tegel, menunjukkan adanya upaya pelestarian warisan sejarah dan spiritual masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Sakka:

“roloa anjo batua anu rua ja mingka ta pue ruai se’rea jari anjari tallu mi. punna lingkai taua kunjo mae angerangi minnya na sapui anjo batu ana kulle ricini anjo gambarang jarangia Lalang. Maing tongi anjo rolo batua solang naung mingka naiki kalengna ambali”

Artinya:

“Dulu batu tersebut hanya ada dua akan tetapi salah satu diantara batu tersebut terbelah sehingga sekarang sudah menjadi tiga bagian. Biasanya orang Ketika kesana membawa minyak untuk di olesi di batu tersebut agar terlihat Gambaran di batunya. Batu tersebut dulu juga pernah jatuh akan tetapi kembali naik dengan sendirinya.”

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa di sana kita dapat menemukan tiga batu besar yang konon katanya di antara batu itu ada yang terbelah menjadi dua bagian dan di dalam batu tersebut ada gambaran kuda yang ketika di olesi minyak maka gambarnya akan terlihat. Menurut cerita rakyat sekitar bahwa batu itu dulunya pernah jatuh menggelinding jauh kebawah akan tetapi kembali lagi dengan sendirinya. Oleh karena itu, sehingga batu tersebut di keramatkan. Batu dan sumur tersebut di keramatkan oleh Masyarakat sekitar Turungang di yakini bahwa apa yang ingin di capai bisa terlaksana jika kita di izinkan olehnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Sakka:

“punna rieng ri eloki na nasare toa kamaseang na punna eloki lolongangngi”

Artinya:

“Kalau ada yang kita mau dan di beri izin olehnya maka akan di dapatkan.”

Maka dari itu, seseorang bisa mendapatkan apa yang ia inginkan apabila di izinkan olehnya dan tidak akan mendapatkannya apabila tidak di izinkan. Hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya mereka yang akan mengunjungi batu dan sumur tersebut sebelumnya telah memiliki niat untuk datang kesana dan bernazar Ketika apa yang ia inginkan telah di capai. Apabila mereka telah bernazar dan tidak datang ke sumur dan batu tersebut maka akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Tradisi ini telah di lakukan secara turun temurun. Pada saat Masyarakat ingin mengunjungi sumur dan batu tersebut maka terlebih dahulu harus di lakukan prosesi *ma’baca* pada malam hari sebelum keesokan harinya datang ke sana. Adapun prosesi *ma’baca* tersebut antara lain:

1. Menyiapkan 7 ekor ayam yang dibagi menjadi beberapa jenis “*manu’ lapping, bulu sirua, na betti’ bole, kulle Tongji tambahanna manu maraengia*” (Ayam lapping, bulu sirua, dan ayam betti’ bole. Bisa juga ditambahkan dengan ayam lain sampai jumlahnya tujuh.)
2. Proses *ma’ baca* menggunakan beberapa macam makanan yaitu:
 - a. Tujuh dulang yang di dalamnya berisi: sokko’ tiga macam yang di atasnya di beri kelapa dan satu buah telur, satu ekor ayam, lawa bete, nasi kuning, dan kacang hijau yang telah di rebus.
 - b. Mangkok yang berisikan beras kemudian di tancapkan daun sirih dan kapur yang telah di ikat menggunakan benang putih berbentuk kerucut dan di atasnya di kasih buah pala yang telah dibelah.
 - c. Tujuh tempat daun sirih berbentuk Panjang yang telah di isi kapur dan di ikat dengan benang putih kemudian di atasnya di beri buah pala yang telah di belah dan di simpan di dalam piring kecil yang berisikan 5 daun sirih atau tujuh tergantung dari yang menyajikan dan di taruh di atas bantal guling.
 - d. Sebotol minyak yang akan di gunakan pada saat ke batu tersebut gunanya agar lukisan yang ada di sana terlihat pada saat di oleskan.
 - e. 4 buah kelapa yang di atasnya di beri 2 kacang hijau rebus yang dibentuk menyerupai lilin lalu di bakar.
 - f. Songkok dan *cipo hajji* (penutup kepala yang biasanya di gunakan oleh orang bugis bergelar haji) di taruh di atas sarung dan kain putih
 - g. Satu piring berisikan beras yang di atasnya di beri rokok, korek, dan uang tunai.
 - h. Kobokan dan gelas yang telah di isi air,
 - i. Dupa,
 - j. Kain putih yang di taruh di atas kepala *sanro*.
3. Setelah semuanya siap maka *sanro* sudah bisa memulai prosesi *ma’baca*. Di mulai dengan pembacaan doa, kemudian dupa di buat mengelilingi sesajian tersebut sebanyak tujuh kali dengan cara di oper satu persatu dan dua orang akan memainkan alat musik gendang pada saat dupa tersebut berputar.
4. Ke esokan harinya, barulah mereka datang ke sumur dan batu tersebut. Sebelum masuk kedalam, *sanro* terlebih dahulu membacakan doa.

Adapun mengenai *emba* di Turungang berdasarkan hasil wawancara dengan H. Sakka: “*lohe emba ri turungang, rieng sabbuna emba Puangta turungang, emba Puangta Baru, emba Puangta ri Jampu, embana Puangta ri Tangnga, na embana Puangta Sapotangnga*”

Artinya:

“ada banyak *emba* di Kerajaan Turungeng, ada yang Namanya *embana Puangta Turungang, emba Puangta Baru, emba Puangta ri Jampu, embana Puangta ri Tangnga, dan emba Puangta Sapotangnga.*”

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa di Kerajaan Turungeng sendiri terdapat beberapa *emba* yang berada di lokasi berbeda setiap batunya. Terdapat lima Lokasi, yaitu *emba Puangta turungang, emba Puangta Baru, emba Puangta ri Jampu, embana Puangta ri Tangnga, dan embana Puangta Sapotangnga.*

Kesimpulan dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Turungeng merupakan pusat kekuasaan awal di Sinjai yang terbentuk melalui legitimasi sosial, spiritual, dan adat. Kehadirannya menandai transisi masyarakat dari komunitas sederhana menuju struktur politik terorganisasi dengan basis kepercayaan kolektif terhadap figur *To Manurung*. Dominasi

kepemimpinan perempuan memperlihatkan konstruksi sosial unik yang menempatkan peran perempuan sebagai sentral dalam pemerintahan. Jejak sejarah dan spiritualitas kerajaan masih terpelihara melalui situs-situs keramat seperti sumur, batu, dan *emba* yang diwariskan secara turun-temurun, menegaskan kedudukan Turungeng sebagai embrio federasi kerajaan Pitulimpoe serta simbol integrasi sosial-politik masyarakat Sinjai.

B. Struktur dan Hierarki Kekuasaan

Pada bagian awal kronik Sejarah Bugis memuat mengenai dengan ikrar yang berisi kesepakatan antara Raja dengan rakyatnya. Termasuk perjanjian Kerjasama antara Raja dengan *pa'banua* (penghuni *wanua*) yang merupakan anggota masyarakat biasa. Ada juga sebuah Lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara penguasa dan Masyarakat biasa yang terdiri dari berbagai pejabat dengan nama, peran, dan struktur yang berbeda-beda antar Kerajaan yang satu dengan yang lain. Seperti *Sullewatang* (pengganti Raja), *pabicara* (hakim dan penasihat), *suro* (penghubung Raja dan rakyat), serta *matoa* (para pemimpin Masyarakat). Setelah itu, kesepakatan tersebut di ikuti dengan penetapan hak dan tanggung jawab dari kedua pihak. Raja diangkat sebagai pemimpin di sebuah *wanua* bukan hanya karena ia seorang yang merupakan titisan *dewata*, akan tetapi karena di angkat oleh rakyat yang bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, pendapatan khusus, dan barang-barang lain kepada sang Raja (Pelras, 2021).

Struktur pemerintahan di Kerajaan-kerajaan besar, baik yang bersifat federasi maupun konfederasi hampir serupa dengan pola pemerintahan yang lebih kecil. Di Wajo, pemimpin yang di kenal sebagai *Arung Matoa* (Raja para Matoa yang di isi dengan laki-laki) di damping oleh sebuah dewan yang terdiri dari enam *Arung* (yang terdiri dari tiga *Ranreng*/pendamping) baik laki-laki maupun perempuan dari ketiga *limpo*, dan setiap *limpo* juga memiliki seorang *Bete Lompo* (pemegang panji/panglima perang). Meskipun gelar mereka lebih rendah, kekuasaan keenam *Arung* (*Arung ennenge*) dalam dewan tersebut setara dengan *Arung Matoa* sendiri. Bersama *Arung Matoa*, mereka membentuk dewan tertinggi yang di sebut dengan *Petta ri Wajo'* (Tuan kita di Wajo'). Selain itu, setiap *limpo* juga memiliki seorang *Suro ri Beteng* (duta negeri) yang bertugas menyampaikan pesan dari pemerintah ke wilayah bawahan, bersama dengan empat *Arung Ma'Bicara* (dewan penasihat Raja) yang membahas masalah hukum dan adat yang tidak dapat di selesaikan di Tingkat *wanua*, serta enam penasihat lainnya yang berfungsi memberikan masukan (Pelras, 2021).

Dapat di simpulkan bahwa awal kronik sejarah Bugis yang memuat ikrar sebagai kesepakatan antara penguasa dan rakyat, termasuk kerja sama antara Raja dengan *pa'banua*, anggota masyarakat biasa. Terdapat lembaga penghubung antara penguasa dan masyarakat umum yang terdiri dari berbagai pejabat dengan nama, fungsi, dan struktur berbeda antar kerajaan, seperti *Sullewatang* sebagai pengganti Raja, *pabicara* sebagai hakim dan penasihat, *suro* sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat, serta *matoa* sebagai pemimpin masyarakat. Setelah kesepakatan dibuat, ditetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak; Raja diangkat sebagai pemimpin di *wanua* bukan hanya karena dianggap titisan dewata, tetapi juga karena dipilih oleh rakyat yang bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, pendapatan khusus, dan kebutuhan lain bagi sang penguasa. Struktur pemerintahan di kerajaan besar, baik federasi maupun konfederasi, memiliki pola yang hampir sama dengan pemerintahan di wilayah lebih kecil. Keempat puluh pejabat ini (tiga *Ranreng*, tiga *Bete Lompo*, tiga *Suro ri Bateng*, dua belas *Arung Ma'Bicara*, delapan belas penasihat), di tambah *Arung Matoa*, di sebut sebagai *Arung Patappulo* (empat puluh Raja) dan membentuk Lembaga pemerintahan utama yang mirip dengan parlemen (Pelras, 2021). Adapun di Kerajaan Sinjai sendiri, struktur pemerintahannya sebagai berikut:

1. *Arung*, adalah sebutan bagi seorang yang memegang posisi sebagai Raja dalam sebuah Kerajaan. Orang yang di sebut *Arung* ini berada di puncak hierarki khususnya pada Kerajaan Turungeng. Kekuasaan sepenuhnya tidak hanya di tangan *Arung*, melainkan juga di dukung oleh *Sullewatang* dan *Gellarang* yang bertindak sebagai perwakilan rakyat sekaligus membatasi kekuasaannya. Di samping itu, *Arung* juga berperan sebagai panglima perang tertinggi di Kerajaan tersebut.
2. *Sullewatang*, berasal dari istilah *Sulle* (dalam Bahasa bugis dan konjo) yang berarti pengganti sedangkan *Watang* berarti badan. Dengan demikian, *Sullewatang* berperan sebagai perwakilan dan asisten Raja dalam melaksanakan administrasi, melaksanakan aganinan tugas Raja, serta membantu menyelesaikan persoalan di Kerajaan Turungeng.
3. *Gellarang*, adalah suatu badan pemerintahan yang terdiri dari sejumlah anggota. Tugas *Gellarang* meliputi pelantikan dan pemberhentian Raja, menetapkan peraturan yang berlaku di Kerajaan Turungeng, serta memantau pelaksanaan pemerintahan di wilayah tersebut.
4. *Aru*, adalah jabatan yang memimpin suatu wilayah yang berada di bawah penguasaan Kerajaan Turungeng. Tugas dari *Aru* adalah melaksanakan perintah dari *Arung*.
5. *Sareang*, adalah utusan *Arung* yang di tugaskan untuk pergi ke rumah-rumah Masyarakat jika terjadi kerusuhan demi kepentingan Kerajaan.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa struktur pemerintahan di Kerajaan Sinjai, khususnya dalam Kerajaan Turungeng. Di puncak hierarki terdapat *Arung*, yang merupakan Raja dan memiliki kekuasaan tertinggi, namun kekuasaannya dibatasi oleh *Sullewatang* dan *Gellarang*. *Sullewatang* berfungsi sebagai perwakilan dan asisten Raja dalam administrasi dan penyelesaian masalah kerajaan. *Gellarang* adalah badan pemerintahan yang bertugas melantik dan memberhentikan Raja, menetapkan peraturan, serta memantau pelaksanaan pemerintahan. Jabatan *Aru* memimpin wilayah di bawah Kerajaan Turungeng dan melaksanakan perintah dari *Arung*. Sementara itu, *Sareang* adalah utusan *Arung* yang ditugaskan untuk mengatasi kerusuhan di masyarakat demi kepentingan kerajaan. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan Kerajaan Sinjai.

C. Hubungan Politik dengan Kerajaan Lain

Tahun 1564 merupakan tahun yang bersejarah bagi kabupaten Sinjai. Ia mendapatkan banyak kunjungan dari dua Kerajaan besar yang sedang berperang dan berebut pengaruh. Hal ini yang di sebabkan karena letak daerah Sinjai berada di lintas batas dan sangat strategis bagi kedua Kerajaan yakni Kerajaan Bone di Utara dan Kerajaan Gowa di Selatan (Teluk Bone, 2022). Sebenarnya kedua Kerajaan yang sedang berperang tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan-kerajaan di Sinjai, maka Kerajaan Tellulimpoe dan Pitulimpoe berupaya untuk tidak memihak atau terlibat dalam perang tersebut. Bahkan Raja-Raja di Kerajaan Sinjai berusaha mempertemukan pimpinan Kerajaan tersebut agar berunding dan berdamai. Akhirnya pada Februari tahun 1564 Raja Bulu-Bulo ke VI La Mappassokko Lao Mano'e Tanru'na berhasil mempertemukan antara Kerajaan Gowa yang di wakili oleh I mangara Daeng Mameta dengan La Tenri Rawe Bongkange Raja Bone ke VII. Pertemuan itu dii saksikan oleh Raja-Raja lain sehingga lahirlah perjanjian perdamaian yang di kenal dengan nama Perjanjian *Topekkong* atau *Lamung Patue ri Topekkong* (Anis, 2013).

Disebut *Lamung Patoe ri Topekkong* karena pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan dengan upacara penanaman batu besar. Bagian batu yang dikuburkan memiliki makna agar sikap-sikap keras yang merugikan semua pihak. Sedangkan bagian batu yang timbul sebagai simbol persatuan yang tidak mudah bergeser. Adapun Isi perjanjian *Topekkong*:

1. *Madumme' to si palalo, mabbelle' to sipasoro', seddi pannanua pada riappunnai, lempa asepa mappannessa* (Saling mengizinkan dalam mencari tempat bernaung, saling memberi kesempatan dalam mencari rezeki, satu rakyat milik kita semua, kemanalah padinya di bawa itulah yang menentukan Kerajaan mana yang dipilihnya).
2. *Musunna Gowa musunna to Bone na Tellulimpoe makkutopi assibalirena* (musuh Kerajaan Gowa juga musuh Kerajaan Bone dan Tellulimpoe begitupun sebaliknya)
3. *Sisappareng deceng tessimappareng ja', sirua menre tessirui' no', malilu sipakainge' mali siparappe* (saling memberikan kebaikan bukan kejahatan, saling bantu tidak saling mencelakakan, yang lupa diri di ingatkan dan yang hanyut di selamatkan)

Isi dari perjanjian Topekkong menggambarkan bahwa Kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai di wakili oleh Kerajaan Bulu-bulu tertarik untuk memperhatikan dan memahami dampak paling buruk dari konflik antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Dengan berdasarkan ikatan keluarga, La Mappasokko mengambil Langkah untuk menengani perselisihan ini. Langkah tersebut menunjukkan kepedulian dan keterlibatan Kerajaan-kerajaan di Sinjia dalam meredakan perang yang menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda. Selain itu, isi perjanjian Topekkong juga mencakup *frem work* sikap inklusif dan keterukaan dari para Raja yang ada di Sinjai (Anis, 2013). Konflik yang terjadi antara Kerajaan Gowa dan Bone akhirnya untuk sementara di hentikan dengan adanya perjanjian Caleppa atau *ulukanayya ri caleppa* pada tahun 1565. Isi perjanjian tersebut antara lain:

1. Bone di berikan daerah dari Sungai Walannae di sisi Barat hingga wilayah Ulaweung di Utara.
2. Sungai Tangka berada di perbatasan antara Bone dan Sinjai. Perbatasan antara Bone dan Gowa terletak di bagian Utara yang termasuk bagian Bone dan bagian Selatan termasuk Gowa.
3. Agar wilayah Cenrana dapat menjadi bagian dari kekuasaan Bone, karena sebelumnya Cenrana telah di taklukkan oleh Raja Bone ke V La Tenrisukki Mappajange dan berhasil merah kemenangan dalam perang melawan Raja Luwu yang Bernama Raja Dewa yang selama ini menguasai Cenrana (Anis, 2013).

Dari isi perjanjian Caleppa menggambarkan persaingan perebutan daerah kekuasaan antara Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Gowa. Khusus pada poin kedua, dampak dari konflik antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa membawa Kerajaan-kerajaan di Sinjai berada di bawah pengaruh Gowa. Dengan Sungai Tangka yang di jadikan sebagai batas kedua wilayah tersebut. Di poin ketiga, menjelaskan bahwa daerah Cenrana menjadi bagian dari kekuasaan Bone di karenakan Bone berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Sejak tahun 1565, Kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai secara resmi berafiliasi ke Gowa. Pertikaian antara Kerajaan Gowa dan Bone untuk menjadi pemeran utama dalam aspek politik serta ekonomi di Sulawesi Selatan dan Tenggara, perluasan wilayah, penaklukkan melalui perang atau perundingan damai, termasuk juga pernikahan antara pemuka daerah setempat. Semua itu di lakukan dengan tujuan untuk menguasai sumber daya laut atau perairan dan lahan pertanian (Mattulada, 1998).

Dapat di simpulkan bahwa Tahun 1564 menjadi momen penting bagi Sinjai karena wilayah ini menjadi pusat perhatian dua kerajaan besar yang tengah bersaing memperebutkan pengaruh, yaitu Kerajaan Bone di utara dan Kerajaan Gowa di selatan, karena letaknya yang strategis di perbatasan. Meskipun kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan di Sinjai, kerajaan Tellulimpoe dan Pitulimpoe berusaha menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik. Para raja di Sinjai bahkan berinisiatif mengupayakan perdamaian dengan mempertemukan pemimpin kedua kerajaan. Pada Februari 1564, Raja Bulu-Bulu ke VI, La

Mappassokko Lao Mano'e Tanru'na, berhasil memediasi pertemuan antara perwakilan Gowa, I Mangara Daeng Mameta, dan Raja Bone ke VII, La Tenri Rawe Bongkange, yang disaksikan oleh raja-raja lain sehingga tercapai Perjanjian Topekkong atau *Lamung Patue ri Topekkong*.

Konflik antara Gowa dan Bone sempat dihentikan sementara melalui Perjanjian *Caleppa* pada 1565, yang mengatur pembagian wilayah seperti pemberian daerah dari Sungai Walannae hingga Ulaweung kepada Bone, penetapan Sungai Tangka sebagai batas antara Bone dan Sinjai, serta pengakuan atas wilayah Cenrana sebagai bagian dari Bone setelah penaklukan atas Luwu. Perjanjian ini mencerminkan persaingan wilayah antara Bone, Luwu, dan Gowa, serta menandai afiliasi kerajaan-kerajaan Sinjai ke Gowa sejak 1565. Pertikaian tersebut merupakan upaya kedua kerajaan untuk menguasai aspek politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui perluasan wilayah, perang, perundingan damai, dan pernikahan antar pemuka daerah, dengan tujuan utama mengendalikan sumber daya laut dan lahan pertanian.

D. Dinamika Ekonomi dan Kekuasaan

Migrasi dan pembentukan pemukiman baru dalam jumlah besar yang berlangsung pada abad 14 dan 15 M menghasilkan situasi ekonomi yang berbeda. Sebelumnya, perekonomian tradisional di Sulawesi Selatan bergantung pada ekspor barang-barang langka, sehingga kontrol perdagangan berada di tangan golongan bangsawan yaitu kelas tertutup yang menguasai Lokasi-lokasi strategis tanpa perlu memperhatikan banyaknya rakyat. Para Raja sejatinya tidak memerlukan banyak rakyat. Sekedar kelompok kecil individu yang di butuhkan untuk menyuplai makanan, tenaga kerja dan pasukan yang cukup demi menjaga kedaulatan mereka. Namun, pada abad ke 15 M, perekonomian mulai mengalami pergeseran terutama di bidang pertanian. Untuk memperoleh kekuasaan, seseorang harus bisa menguasai pusat-pusat produksi padi yang terus meluas seiring dengan meningkatnya populasi (Pelras, 2021).

Pada abad ke 16 M muncul suatu perdagangan baru yaitu Budak yang di jual seharga 1000 rial. Budak tersebut merupakan para tawanan perang baik itu Perempuan, laki-laki, maupun anak-anak berasal dari tempat yang telah di taklukkan. Kemudian pada abad ke 19 M dagangan yang paling terkenal yaitu kain tenun yang (mungkin) terbuat dari kapas dan di jual dengan harga sekitar 200 rial (Pelras, 2021). Di bidang peternakan, Sulawesi Selatan tidak cukup berkembang, walaupun kerbau telah lama menjadi hewan untuk kurban dan lambang kekayaan. Di masa lalu kerbau hanya di pakai untuk mengolah sawah. Pada abad ke-14 M tampaknya kerbau mulai di gunakan untuk membajak ladang. Selanjutnya, di abad ke-20 M umumnya kerbau di gantikan oleh sapi Bali. Daging dari kedua jenis hewan ini biasanya hanya di konsumsi saat perayaan. Jika dibandingkan dengan kerbau dan sapi, kuda terlihat mendapatkan perawatan yang lebih baik dikarenakan fungsinya sebagai hewan tunggangan dan angkutan. Daging yang paling banyak di makan adalah unggas, terutama ayam. Namun, beberapa jenis unggas seperti bebek hanya di pelihara liar seperti belibis dan rusa diburu untuk dijadikan hidangan Istimewa bagi kalangan bangsawan. Baru di tahun 1990-an, peternakan ayam secara besar-besaran mulai di kembangkan dan semakin populer (Pelras, 2021).

Mayoritas Masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan. Di Sinjai sendiri khususnya di daerah Sinjai Barat mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Karena lokasinya yang berada di daerah pegunungan sehingga berbeda dengan Masyarakat yang berada di pesisir Pantai yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Bertani dan berkebun sudah di lakukan Masyarakat sejak lama. Bahkan salah satu alasan pada saat Belanda ingin mengambil tiga Kerajaan yang berada di Pitulimpoe (Pao, Suka, dan Balasuka) karena wilayah tersebut memiliki tanah yang subur untuk menanam berbagai macam tanaman. Sebuah kerugian besar bagi Sinjai terjadi Ketika tiga

Kerajaan yang berasal dari Pitulimpoe yaitu Pao, Suka, dan Balasuka yang di ambil alih oleh Gowa memiliki dampak yang cukup besar. Dampak tersebut terlihat dari aspek luas wilayah, hubungan kekerabatan yang harus terpisah karena politik yang tidak di pahami oleh Masyarakat kecil. Namun, yang paling parah sebenarnya adalah kerugian dari segi pendapatan daerah atau ekonomi mengingat wilayah yang telah di rebut tersebut adalah lahan yang subur dan sangat berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah (Muhannis, 2022).

Banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara pendiri komunitas Bugis di masa lalu, atau Raja pertama mereka, dengan praktik pertanian padi basah menggunakan sistem pembajakan. Oleh karena itu, salah satu benda pusaka (*ARajang*) yang dimiliki oleh berbagai Kerajaan bugis ialah bajak yang konon di turunkan dari langit bersamaan dengan Raja pertama. Selain itu, setiap daerah memiliki sawah *ARajang* yang di gunakan dalam perayaan pertanian tahunan oleh suatu komunitas termasuk upacara untuk penbajakan yang pertama dan di hadiri oleh Raja (Pelras, 2021). Hingga saat ini Masyarakat Sinjai Barat Ketika akan memulai menanam padi mereka melakukan sebuah tradisi yang di sebut dengan *Mappammula*, Ketika tanaman padinya telah tumbuh di lakukan tradisi *Mapalise Ase*, dan Ketika akan melakukan panen melakukan tradisi *Mappadendang*. Mereka meyakini bahwa *Mappammula*, *Mapalise Ase*, dan *Mappadendang* merupakan kebiasaan tradisi yang telah di lakukan secara turun temurun yang menandakan bahwa aktivitas pertanian di daerah Kerajaan Turungeng sudah berlangsung sejak lama.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa mengenai perubahan ekonomi dan sosial di Sulawesi Selatan dari abad ke-14 hingga ke-20 M. Pada awalnya, perekonomian tradisional bergantung pada ekspor barang langka yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Namun, pada abad ke-15, terjadi pergeseran menuju pertanian yang lebih luas seiring dengan meningkatnya populasi. Perdagangan budak muncul pada abad ke-16, diikuti oleh perdagangan kain tenun pada abad ke-19. Masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di Sinjai, mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, dengan pertanian padi menjadi kegiatan utama. Pengambil alihan tiga kerajaan di Pitulimpoe oleh Gowa berdampak besar pada ekonomi dan hubungan sosial masyarakat. Tradisi pertanian seperti *Mappammula*, *Mapalise Ase*, dan *Mappadendang* menunjukkan pentingnya praktik pertanian yang telah berlangsung lama. Saat ini, mayoritas masyarakat Sinjai Barat masih bekerja sebagai petani, dengan variasi mata pencaharian lainnya.

E. Pengaruh Kolonialisme

Inggris pada tahun 1816 menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda, ditandai dengan penunjukan tiga komisaris jenderal yakni Buyskes, Mr. Elaut, dan baron Van Der Capellen, yang kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada periode 1816–1826 (Hamid et al., 2002a). Upaya Van Der Capellen untuk menegaskan kembali dominasi Belanda menghadapi resistensi luas dari para raja dan rakyat di berbagai wilayah, termasuk Maluku, Sumatera, dan Jawa, serta keterlibatan aktif para penguasa Sulawesi Selatan dalam menolak kembalinya kekuasaan kolonial (Hamid et al., 2002b). Penyerahan kekuasaan di Sulawesi Selatan secara formal berlangsung pada Oktober 1818 dengan Chasse sebagai perwakilan Belanda, meskipun wilayah kekuasaan Inggris sebelumnya hanya meliputi beberapa benteng strategis seperti Benteng Ujung Pandang, Vrendeburg, Maros, Bantangg, Bulukumba, Selayar, dan Buton (Abduh, 1981). Setelah serah terima tersebut, Belanda berupaya memperluas pengaruh secara damai, namun gagal memperoleh legitimasi politik dari penguasa lokal. Situasi ini mendorong Kolonel Van Scelle pada Oktober 1821 meminta tambahan pasukan dan persenjataan dari Batavia guna melancarkan tindakan represif terhadap para raja di Sulawesi Selatan yang menolak tunduk pada otoritas Belanda.

Jenderal Mayor de Kock selaku gubernur jenderal di Batavia memberikan persetujuan atas permintaan bantuan militer, namun kebutuhan Belanda untuk menghadapi perlawanan di daerah lain menghalangi pemenuhannya. Kondisi tersebut memaksa Kolonel Van Shelle bertahan hingga bantuan dari Van der Capellen tiba. Menjelang kedatangan Van der Capellen di Ujung Pandang, dibentuk komisi yang terdiri atas Van Shelle dan Mr. I.H. Tobias dengan mandat mengundang raja-raja Sulawesi Selatan untuk menghadiri perundingan. Hasil pertemuan tersebut ialah perjanjian yang ditandatangani pada 9 Agustus 1824, berupa pembaruan atas Perjanjian Bungaya 1667 (Abduh, 1981). Kehadiran Belanda di Ujung Pandang menciptakan dinamika disintegrasi sekaligus integrasi dalam tatanan Kerajaan Gowa. Praktik monopoli dagang VOC, pembatasan kekuasaan, serta upaya penguasaan kembali wilayah taklukan memicu ketidakpuasan masyarakat yang sebelumnya menikmati keuntungan ekonomi dan status sosial tinggi (Hamid et al., 2002b).

Perjanjian Bungaya tahun 1667 antara Belanda yang diwakili Laksamana Speelman dan Kerajaan Gowa di bawah Sultan Hasanuddin menjadi titik balik politik regional Sulawesi Selatan karena menandai pengalihan kekuasaan atas sejumlah wilayah strategis kepada Belanda, termasuk kerajaan-kerajaan federasi Tellulimpoe dan Pitulimpoe. Hegemoni kolonial ini tidak hanya melemahkan dominasi politik Gowa, melainkan juga memicu resistensi dari kekuatan lokal yang menolak subordinasi terhadap kekuasaan asing. Perlawanan signifikan muncul segera setelahnya, ketika pasukan Pitulimpoe di bawah komando Arung Manipi, Nyomparang Daeng Pabeta, bergabung dengan Bone untuk menyerang Belanda di Bantaeng dan menewaskan banyak serdadu (Komunitas Tobonga, 2021). Insiden tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan federatif lokal masih berfungsi sebagai instrumen mobilisasi militer, sekaligus menjadi simbol kontinuitas perlawanan. Pola resistensi berlanjut pada Agresi Militer II tahun 1825 di Mangarabombang Sinjai, saat pasukan Manipi dan Turungang dipimpin La Pattaro Daeng Pacidda Arung Terasa bersama Manimpahoi berhasil memukul mundur Belanda (Komunitas Tobonga, 2021). Fakta historis ini menegaskan bahwa meskipun kekuasaan formal Gowa tergerus, dinamika politik lokal memperlihatkan adanya jaringan solidaritas antarkerajaan yang mampu mempertahankan kedaulatan melalui strategi perlawanan bersenjata, sehingga kolonialisme tidak pernah sepenuhnya menghapus struktur politik tradisional di kawasan tersebut.

Ekspansi Belanda melalui Agresi Militer III pada 1859 menunjukkan pola kolonialisme berbasis ekonomi-politik yang tidak sekadar berorientasi pada dominasi militer, melainkan juga penguasaan sumber daya agraria. Jatuhnya Tellulimpoe dan Pitulimpoe pada 20 November diikuti dengan pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah Kapten Wiegen pada 25 November 1859 yang segera menginisiasi kebijakan eliminasi dua kerajaan lokal, yakni Turungeng dan Bulu-Bulu. Prioritas penghancuran Kerajaan Turungeng didorong kepentingan Belanda menguasai wilayah subur Pitulimpoe, khususnya Pao, Suka, dan Balasuka, sebagai basis perkebunan kopi dan komoditas pertanian lain yang bernilai ekspor (Komunitas Tobonga, 2021). Penyerahan wilayah tersebut pada 12 Februari 1860 kepada Raja Gowa XXXII I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembang Parang bukan sekadar langkah administratif, tetapi strategi politik kolonial untuk memecah otoritas tradisional Turungeng dan menempatkan wilayah di bawah pengawasan kekuasaan yang lebih mudah dikendalikan.

Pola dominasi tersebut menegaskan bahwa kolonialisme Belanda tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi yang beriringan dengan fragmentasi politik lokal. Penguasaan tidak hanya terbatas pada Pao, Suka, dan Balasuka, melainkan meluas ke wilayah selatan seperti Katanorang, Borong Langi'e, dan Bontouhe, memperlihatkan orientasi Belanda pada pengendalian penuh kawasan strategis Sinjai. Ekspansi ini mencerminkan strategi imperialisme modern yang menggabungkan kekuatan militer, kontrol administratif, dan rekayasa politik untuk menundukkan

kerajaan-kerajaan lokal serta mengintegrasikan wilayah subur Nusantara ke dalam jaringan perdagangan global berbasis kolonial. Orang-orang Pao, Suka, dan Balasuka pada saat itu marah dan tidak ingin lepas dari Turungang. Mereka memiliki perjanjian yang mengatakan “*Turungang Toai ri jajiang, Manipi toai ri pangada’kang, Balasuka to ri larik tana’*” yang artinya “Turungeng dituakan dalam hal terbentuknya, Manipi di tuakan dalam hal urusan adat, dan Balasuka dituakan dalam hal urusan pertanahan”

Pada Februari 1862 meletus perlawanan baru yang dipimpin Karaeng Balasuka bersama kedua putranya, Daeng Pasallu dan Daeng Papada, dengan dukungan Karaeng Lombok, anak Arung Pao I Yutte Daeng Sialu, serta putranya Baso Pasau Daeng Sulaiman (Muhannis, 2022). Aksi penyerangan tersebut memicu kemarahan Belanda dan menimbulkan tekanan terhadap Gowa yang saat itu berperan sebagai pelindung wilayah Gubernemen baru di Pao, Suka, dan Balasuka. Sebagai respon, Raja Gowa menghukum para pemberontak. Arung Suka tewas, sedangkan Belanda menangkap Karaeng Lombok I Yutte Daeng Sialu beserta putranya Baso Pasau Daeng Sulaiman dan mengasingkan mereka ke Cianjur, Jawa Barat, pada 12 Agustus 1862 berdasarkan SK pembuangan nomor 43. Penindakan berlanjut hingga Oktober 1864 ketika Karaeng Balasuka dan Daeng Pasallu turut ditangkap dan dibuang ke lokasi yang sama. Dalam masa pengasingan, Baso Pasau Daeng Sulaiman menikah dengan Nyi Masrumi dan memperoleh seorang putra pada 1866 bernama Daeng Kanduruang Ardi Winata. Sosok ini kemudian dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia awal yang menulis novel berbahasa Sunda berjudul *Barung ka nu ngarora (Racun bagi para muda)* pada 1914, serta menjabat sebagai Ketua Redaksi *Commisie Voor Volksleetur* pada 1911–1917. Menurut Muhannis (2022), penghapusan Turungeng dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni keterlibatan pasukan Turungeng yang tidak melarang pasukan Pitulimpoe berperang pada 1825 di bawah pimpinan La Pattaro Daeng Pacidda, sikap pasif saat penyerangan JA. Bakkers di Manipi, perlindungan terhadap Arung Balasuka dan Daeng Pasellu ketika menyerang Manipi, serta tindakan menyembunyikan cucu Arung Pone, Datu Halia dan Basse Sanjata, yang hendak dijadikan raja bawahan di Bone melalui wilayah Manipi atau Turungeng.

Basse Sanjata dipandang layak menjadi raja karena statusnya sebagai bangsawan Linrung Bulu-Bulo, putri dari Mariati Daeng Matajang dan Makkatunreng Daeng Malompo, keturunan langsung Karaeng Kajang. Selain itu, ia memiliki ikatan darah dengan I Mandacini La Pute Isinna Arung Patimpeng, yang memperkuat legitimasi politik dan sosialnya. Legitimasi tersebut semakin kuat melalui perkawinannya dengan Datu Halia, cucu Arung Sumaling dan Lamallarangeng Datu Sailong, yang masih memiliki garis keturunan dari Besse Tonra, anak La Mappareppa To Sappewalie Mattinroe ri Sumba Opu dengan Gumittiri, anak Syekh Yusuf. Diketahui pula bahwa suami Besse Tonra ialah Syekh Namrullah, seorang ulama besar yang diyakini sebagai cucu Nabi Muhammad Saw. Dari sisi genealogi, hubungan keluarga antara Basse Sanjata dan Datu Halia bertemu pada buyut yang sama melalui perkawinan Tuan Majalla dengan I Mariati, anak Arung Gareccing dari garis keturunan Besse Tonra dan Syekh Namrullah. Konteks politik saat itu semakin kompleks ketika pada 24 Desember 1860 wilayah Pao, Suka, dan Balasuka jatuh ke tangan Belanda, namun pengelolaannya diserahkan kepada Kerajaan Gowa. Meski demikian, perlawanan terhadap Belanda dan Gowa terus terjadi hingga mencapai puncak pada April 1862, meskipun gagal karena Belanda sudah menempatkan pasukan di Manipi dan Tengnga Lembang guna mengangkat Besse Rameng sebagai Karaeng Mannipi dan Turungeng. Status Gowa sebagai pengelola tetap dipertahankan dalam situasi tersebut (Muhannis, 2022).

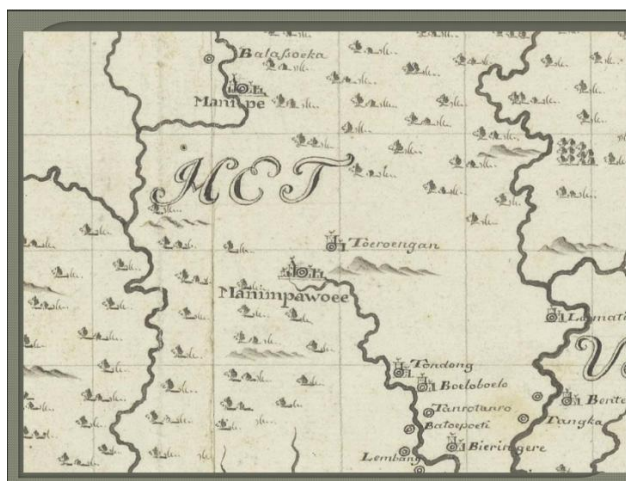
This is a historical map of the North Atlantic Ocean, titled "De Boght van den Bont" (The Bight of the Black). The map is oriented with North at the top. It shows the coastline of North America on the left and the British Isles on the right. The map includes various geographical features, islands, and a compass rose. The map is framed by a decorative border.

Key features and labels on the map include:

- Top Left:** "Nieuw Amsterdam" (New Amsterdam) and "Nieuw York" (New York).
- Top Center:** "Nieuw Engeland" (New England).
- Top Right:** "Nieuw Schotland" (New Scotland) and "Nieuw York" (New York).
- Center:** "Nieuw York" (New York) and "Nieuw Engeland" (New England).
- Bottom Left:** "Nieuw York" (New York) and "Nieuw Engeland" (New England).
- Bottom Center:** "Nieuw York" (New York) and "Nieuw Engeland" (New England).
- Bottom Right:** "Nieuw York" (New York) and "Nieuw Engeland" (New England).

The map is a detailed representation of the North Atlantic, showing the coastline of North America and the British Isles. It includes various geographical features, islands, and a compass rose. The map is framed by a decorative border.

Gambar 3. 3 Peta Belanda tahun 1830



Gambar peta Belanda tahun 1830 memperlihatkan wilayah Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Gowa yang tercakup dalam struktur kekuasaan, menandakan eksistensi Kerajaan Turungeng sebagai salah satu kerajaan besar dengan pengaruh signifikan terhadap kerajaan-kerajaan lain di kawasan Pitulompoe. Posisi strategis Turungeng dalam jaringan kekuasaan lokal semakin jelas dengan catatan bahwa kerajaan ini resmi dihapus pada 1 Agustus 1862 melalui pelantikan Besse Rameng sebagai Arung Manipi ke-10 sekaligus pengganti Karaeng Manipi ke-9, Magguling Daeng Sitonra. Besse Rameng memerintah hingga 27 Oktober 1865, sebelum digantikan oleh Makkunasse Daeng Matteko yang berkuasa dari 27 Oktober 1865 hingga 22 Maret 1873 (Komunitas Tobonga, 2021). Transformasi politik tersebut berlanjut ketika pada 1910 pemerintah kolonial Belanda membentuk sistem administrasi baru dengan afdeling yang dipimpin asisten residen, onderafdeling oleh kontroler, dan distrik di bawah kepala distrik atau bupittra. Perubahan kembali terjadi pada 1916 ketika kolonial Belanda memisahkan secara tegas struktur pemerintahan antara otoritas kolonial dan pelaksana bumi putra. Dalam struktur kolonial, jabatan kontroler menjadi posisi terendah, sedangkan di kalangan pribumi posisi tertinggi diisi oleh regen atau kepala distrik. Struktur ini menegaskan proses subordinasi politik lokal dalam bingkai administrasi kolonial yang sistematis dan hierarkis.

1. *Adatgemeenschap* Bulobulo Timur
2. *Adatgemeenschap* Bulobulo Barat

3. *Adatgemeenscap* Lamatti
4. *Adatgemeenscap* Tondong
5. *Adatgemeenscap* Manimpahoi
6. *Adatgemeenscap* Manipi.

Di manipi sendiri, *Adatgemeenscap* memiliki gelar Puatta Manipi yang membawahi kampung:

1. Magala dengan gelar kepala Magala
2. Tajjuru dengan gelar Gellak Tajjuru
3. Kalimbu dengan gelar Kapala Kalimbu
4. Kampala dengan gelar kapala Kampala
5. Bihulo dengan gelar Kapala Bihulo
6. Terasa dengan gelar Karaeng Terasa
7. Kayutanang dengan gelar Gellak Kayutanang
8. Kaluarang dengan gelar Kapala Kaluarang
9. Hulo dengan gelar Kapala Hulo
10. Lembanna dengan gelar Kapala Lembanna
11. Kasuarang dengan gelar Kapala Kasuarang
12. Soppeng dengan gelar Gellak Soppeng
13. Nangkae/Bongki-bongli dengan gelar Kapala Nangkae/Bongki-bongli
14. Pussanti dengan gelar Kapala Pussanti
15. Barambang dengan gelar Kapala Barambang
16. Baru dengan gelar Gellak Baru
17. Bonto dengan gelar Arung Bonto
18. Baru dengan gelar Gellak Baru (Muhannis, 2022).

Gelar Puatta diberikan kepada kepala distrik sebagai penanda jabatan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Regen. Meskipun nomenklatur berganti, posisi Puatta tetap berada pada tingkat setara dengan Regen, dengan wilayah kekuasaan yang masih disebut *Adatgemeenscap*. Penunjukan kepala distrik ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum di wilayah masing-masing (Muhannis, 2022). Perubahan paling signifikan terjadi pasca-Rumpakna Bone terakhir, khususnya di Sinjai, ketika struktur pemerintahan dan kerajaan mengalami transformasi mendasar. Seluruh Raja yang menjabat sebagai Regen dihapus pada 1913 dan dialihkan menjadi *Adatgemeenschaphoofd* dengan gelar adat Puatta, salah satunya Puatta Baso Daeng Papada di Manipi-Turungeng. Transformasi ini tidak terlepas dari kebijakan Gubernur H. N. A. Swart yang ditetapkan pada 31 Desember 1906 meskipun bersifat sementara, kemudian diperkuat melalui Lembaran Negara Tahun 1910 No. 573 yang berlaku sejak 1 Januari 1911, namun baru diimplementasikan di Sinjai pada 1912–1913 (Muhannis, 2022).

Pemberhentian para raja tidak berarti penghapusan total kekuasaan, melainkan pembatasan peran yang dijalankan selama sistem *Adatgemeenschaphof* masih berlaku. Politik Belanda dalam konteks ini tampak lebih lunak karena pemilihan *Puatta* tetap melibatkan Dewan Adat dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Perbedaan ini cukup signifikan dibandingkan praktik pemerintahan sebelumnya, ketika penunjukan *regen* atau kepala pemerintahan lokal lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kolonial. Meskipun demikian, *Puatta* masih memiliki hak-hak penting, seperti menjalankan fungsi penguasa daerah, menguasai tanah *ARajang*, memegang regalia, serta berbagai kewenangan lain. Sistem baru ini bahkan menyerupai bentuk pengembalian kekuasaan kerajaan, meskipun di sisi lain menimbulkan kelemahan berupa beban pajak yang melampaui kapasitas ekonomi masyarakat pada masa itu (Muhannis, 2022).

Dapat di simpulkan bahwa Gelar Puatta diberikan kepada kepala distrik sebagai tanda jabatan yang menggantikan gelar Regen dalam sistem pemerintahan lama, dengan wilayah kekuasaan yang masih setara dan dikenal sebagai Adatgemeenschap. Pembentukan posisi ini bertujuan menjaga ketertiban hukum di daerah masing-masing. Setelah runtuhnya Rumpakna Bone terakhir, terutama di Sinjai, terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan kerajaan, di mana semua Raja yang menjabat sebagai Regen dihapus pada tahun 1913 dan digantikan oleh Adatgemeenschaphoofd dengan gelar Puatta. Penghapusan Raja tidak menghilangkan kekuasaan mereka sepenuhnya, melainkan membatasi peran sesuai sistem Adatgemeenschap yang masih berlaku, dengan pemilihan Puatta melibatkan Dewan Adat dan tidak sepenuhnya diatur oleh Belanda, berbeda dari sistem sebelumnya yang lebih mengutamakan kepentingan kolonial. Puatta memiliki hak menjalankan tugas sebagai penguasa daerah, menguasai tanah, memegang regalia, dan hak lainnya, sehingga sistem baru ini mirip dengan pengembalian kekuasaan kerajaan, meskipun beban pajak yang tinggi menjadi kelemahan bagi kemampuan ekonomi masyarakat saat itu.

Pada masa Perang Pasifik, khususnya selama Perang Dunia II, Sinjai tercatat sebagai wilayah pertama di Sulawesi Selatan yang berhasil diduduki Jepang. Pendaratan awal pasukan angkatan laut Jepang berlangsung di Lappa, Sinjai, pada 8 Februari 1942, setelah sebelumnya menguasai Sulawesi Tenggara pada 24 Januari 1942. Sehari kemudian, berlangsung serah terima kekuasaan antara Belanda yang diwakili Van Der Poel dan Jepang yang diwakili Gunco Sodai Gucino. Usai proses tersebut, pasukan Jepang bergerak menuju Makassar melalui Camba, kemudian melakukan pendaratan lanjutan di Barombong, sekitar 10 km dari Makassar (Muhannis, 2022). Pasukan gabungan dari Makassar dan Sinjai selanjutnya mengejar pasukan Belanda hingga Enrekang. Puncaknya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten sebagai wakil Belanda dan Letnan Jenderal Hitoshi sebagai wakil Jepang. Perjanjian tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia sekaligus awal era pendudukan Jepang. Dengan demikian, penguasaan Jepang atas Sinjai menjadi bagian integral dari perubahan besar dalam lanskap kolonial di Indonesia (Muhannis, 2022).

Kedatangan Jepang di Sinjai dan wilayah lain pada awalnya ditandai dengan sikap yang seolah ramah, menampilkan diri sebagai “penyelamat yang datang untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda” dan bahkan memperkenalkan diri sebagai “saudara tua”. Strategi ini diiringi dengan upaya meraih simpati rakyat melalui pelibatan tokoh pejuang dan nasionalis, serta pemberian izin pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang dan pembolean menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, langkah-langkah tersebut bersifat temporer karena segera setelah itu diterbitkan berbagai regulasi yang justru membatasi ruang gerak masyarakat. Undang-Undang No. 2/1942 yang dikeluarkan pada 8 Maret 1942 melarang aktivitas seperti berkumpul, menyebarkan berita, hingga mendengarkan siaran radio musuh. Selanjutnya, Undang-Undang No. 3/1942 tanggal 20 Maret 1942 memperketat larangan terhadap aktivitas politik dan keterlibatan dalam pergerakan nasional. Kebijakan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 4/1942 pada 1 April 1942 yang menegaskan larangan pengibaran bendera Merah Putih serta menyanyikan Indonesia Raya, digantikan dengan bendera dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Lebih lanjut, pemerintah Jepang juga menetapkan penggunaan Tarikh Sumera dan menjadikan Toncosetsu sebagai hari raya nasional resmi melalui surat tertanggal 1 April 1942 (Muhannis, 2022).

Tokoh Jepang yang pertama kali menjadi penguasa tertinggi Jepang di Sinjai ialah Gunco Sodai Gucino. Menjelang akhir kekuasaan Jepang, kebijakan pemerintah Jepang di Sinjai mulai

lebih lunak. Seorang tokoh lokal, Andi Mappatoba diangkat menjadi Gonco Sodai untuk menggantikan Gocino. Selanjutnya, menjelang proklamasi kemerdekaan, Abdul Razak SimaRajalelo di tunjuk oleh Jepang sebagai *Ken Kanrikang* (yang setara dengan Bupati) di Sinjai. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya lewat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno Hatta. Di Sinjai, Berita tersebut pertama kali diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai bentukan Belanda setelah Jepang menyerah (Presiden Landgerecht), Daeng Nampo, pada 19 Agustus 1945 melalui Radio Australia yang disiarkan dalam Bahasa Inggris. Berita tentang kemerdekaan tersebut disampaikan kepada Andi Abdul Rahman Petta Umpa, lalu diteruskan kepada *Hulp Bestuur Assisten* (HBA) Sinjai Muhammad Amin Daeng Suro (Muhannis, 2022).

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, disusul oleh kehadiran negara Indonesia timur (NIT) tahun 1946-1950, Sinjai dan termasuk pula daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang setingkat wilayah pemerintahannya kembali disebut *Onderafdeling*. *Onderafdeling* Sinjai tetap menjadi bagian dari wilayah *Afdeling Bonthain*. Sesudah NIT berakhir sejak tahun 1950 (pada masa provinsi Sulawesi RI menjadi kedewasaan Sinjai dalam wilayah daerah Swatantra Bonthain. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat I Sulawesi, Sinjai berubah menjadi salah satu kabupaten daerah Tingkat II, lepas dari daerah Swatantra/kabupaten Bonthain. Sejak tahun 1960-1964 termasuk dalam wilayah provinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara, dan sejak tahun 1964 termasuk wilayah Provinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.¹

Berdasarkan penjelasan mengenai asal-usul nama Sinjai, tidak ditemukan keterkaitan langsung dengan nama federasi Tellulimpoe dan Pitu Limpoe, termasuk Kerajaan Turungeng, melainkan hanya terdapat sebuah toponimi berupa Desa Sanjai di Kecamatan Sinjai Timur. Abu Hamid, Amiruddin, dan Halilintar Latief (2002a) mengemukakan enam versi penamaan Sinjai. Versi To Saja menyebutkan bahwa istilah tersebut berasal dari nama seorang tokoh yang berhasil mempersatukan kelompok masyarakat di Timpae, keturunan Manurung di Ujung Lohe. Versi lain menyebutkan nama itu diambil dari perkampungan tua di Bulu-Bulu, sedangkan versi populer menafsirkannya sebagai istilah dalam Bahasa Makassar yang berarti “sama banyak.” Versi Gowa merekam kisah Raja Gowa XI Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Pallangga Ulaweng yang dalam perjalanan lautnya mendengar perwira menyebut “Sinjai Somangku” (sama banyak wahai tuanku), sehingga istilah Sanjai kemudian digunakan. Versi cerita rakyat pertama menegaskan bahwa Raja Gowa ketika berkunjung ke Bulu-Bulu merasa penduduknya sama banyak dengan Gowa, sehingga menyebutnya Sanjai. Versi cerita rakyat kedua menyebut bahwa jawaban Raja Bulu-Bulu atas pertanyaan Raja Gowa mengenai jumlah kerajaan di Sinjai, yang sama banyaknya dengan sembilan kerajaan kecil di Gowa, melahirkan penamaan tersebut. Versi Bugis menekankan keterikatan kekerabatan antar kerajaan di Sinjai yang dalam bahasa Bugis disebut *kara sijai*, bermakna “satu jahitan”. Dengan demikian, penamaan Sinjai merefleksikan konstruksi identitas lokal melalui interpretasi historis, linguistik, dan kultural yang berlapis.

Ada beberapa versi yang menuliskan mengenai dengan penamaan Sinjai, akan tetapi mereka tetap sama dalam memaknai arti dari kata Sinjai yaitu Sama banyak. Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 mengenai dengan pembentukan daerah tingkat II Sulawesi Selatan, daerah Sinjai berdiri secara resmi sebagai daerah yang otonom. Berbagai versi tersebut menunjukkan bahwa penamaan Sinjai tidak hanya berakar pada aspek linguistik, tetapi juga pada

¹ Inventaris Arsip Pemerintah Kab TK II Sinjai 1951-1974, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2003, h. 6

konstruksi sosial-politik masyarakat setempat. Versi To Saja dan Bugis menekankan narasi integrasi sosial melalui pemersatu atau ikatan kekerabatan, yang mencerminkan legitimasi historis atas harmoni internal. Sebaliknya, versi Gowa dan cerita rakyat mengandung dimensi hegemonik, karena menempatkan Raja Gowa sebagai figur eksternal yang menentukan identitas lokal Sinjai melalui pengakuan simbolis. Dominasi narasi Gowa mengindikasikan upaya integrasi wilayah perbatasan ke dalam orbit kekuasaan Gowa, sehingga penamaan Sinjai dapat dipahami sebagai bagian dari proses peneguhan otoritas politik regional. Pluralitas versi ini memperlihatkan dialektika antara memori kolektif, bahasa, dan kekuasaan, di mana setiap tafsir berfungsi mempertahankan legitimasi identitas kultural maupun politik. Dengan demikian, nama Sinjai tidak semata label geografis, melainkan representasi historis tentang interaksi kekuasaan, kekerabatan, dan konstruksi identitas lokal.

KESIMPULAN

Kajian mengenai Kerajaan Turungeng menunjukkan bahwa entitas politik lokal ini memainkan peran strategis dalam dinamika kekuasaan di Sinjai serta menjadi embrio federasi Pitulimpoe. Keberadaannya ditandai oleh legitimasi *To Manurung*, struktur pemerintahan yang relatif mapan, dominasi kepemimpinan perempuan, serta hubungan politik dengan kerajaan besar seperti Gowa dan Bone. Intervensi kolonial Belanda memunculkan pergeseran tatanan politik yang pada akhirnya menghapus eksistensi Turungeng, namun jejak historis dan warisan budayanya tetap bertahan dalam memori kolektif masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan detail sejarah Turungeng yang sebelumnya terabaikan dalam historiografi Sulawesi Selatan, sehingga memperluas perspektif tentang pola integrasi politik, resistensi terhadap kolonialisme, dan transformasi sosial di tingkat lokal. Implikasi penelitian memperlihatkan bahwa studi sejarah lokal mampu memperkaya pemahaman identitas budaya serta relasi kekuasaan regional. Arah penelitian lanjutan dapat difokuskan pada eksplorasi komparatif antara Turungeng dan kerajaan-kerajaan kecil lain di Sulawesi untuk menyingkap pola resistensi, peran gender, serta dinamika ekonomi-politik dalam konteks kolonial dan pascakolonial.

REFERENSI

- Abduh, M. (1981). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam, Cet I*. Ombak.
- Anis, M. (2013). *Islamisasi Di Sinjai (Suatu Tinjauan Sejarah)*. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Anis, M. (2018a). *Penerimaan Islam Di Sinjai Abad XVII*. UIN Alauddin Makassar.
- Anis, M. (2018b). *Penerimaan Islam Di Sinjai Abad XVII (Analisis Perubahan Sosial-Politik Dan Budaya)*. UIN Alauddin Makassar.
- Bakhlov, I. V., & Bakhlova, O. V. (2018). Imperial Models Of The National And Government Construction. *Bulletin of the Moscow State Regional University (History and Political Science)*, 3, 183–194. <https://doi.org/10.18384/2310-676X-2018-3-183-194>
- Bateman, D. A., & Teele, D. L. (2020). A developmental approach to historical causal inference. *Public Choice*, 185(3–4), 253–279. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00713-4>
- Day, A. (2020). *Sociology of Religion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429055591>
- Demeshchenko, V. (2021). Socio-philosophical context of the history of the cultural and anthropological paradigm. *The Culturology Ideas*, 20, 44–56. <https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.44-56>

- Fazal, T. (2023). 'Documents of Power': Historical Method and the Study of Politics. *Studies in Indian Politics*, 11(1), 140–149. <https://doi.org/10.1177/23210230231166179>
- Hamid, A., Amiruddin, & Lathief, H. (2002a). *Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam*. Padat Daya.
- Hamid, A., Amiruddin, & Lathief, H. (2002b). *Sinjai Di Tengah Pergolakan Kerajaan Dan Penjajahan*. Padat Daya.
- Komunitas Tobonga. (2021). *Sejarah Kerajaan Turungang Sinjai*. Youtube. <https://youtu.be/9h9B1ywQ2f8?si=qIX9RASMUYoIbd8O>
- Lim, I. M. (2018). Studying and constructing history: A historian's take. *HSSE Online*, 7(2). <https://doi.org/10.32658/HSSEO.2018.7.2.2>
- Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Mappangara, S., & Abbas, I. (2003). *Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan*. Lamaca Press.
- Martin, M. (2022). Anthropology. In *Encyclopedia of Big Data* (pp. 33–37). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32010-6_10
- Mattulada. (1985). *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Gajah Mada University Press.
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press.
- More, D. (2023). Historical Method: A Critical Review. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(2), 1089–1092. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.49198>
- Muhannis. (2013). *Karampuang & Bunga Rampai Sinjai, Cetakan II*. Ombak.
- Muhannis. (2022). *Hanua Sinjai, Cetakan I*. Innawa.
- Muqowin, & Maharsi. (2010). *Pendalaman Bidang Studi SKI- Sejarah Islam, Cetakan I*. UIN Sunan Kalijaga.
- Mustafa, M. Y., & Tungke, A. W. (2002). *Sinjai 10 Tahun dalam Memori*. Pustaka Refleksi.
- Oelofse, M. (2011). Applying principles of historical critique: authentic oral history? *Journal for Contemporary History*, 36(1), 191–204.
- Pelras, C. (2021). *Manusia bugis; Terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhady Sirimorok* (2nd ed.). Innawa.
- Prabakaran, D. S. (2023). An Analytical Study On Historical Research. In *Futuristic Trends in Social Sciences* (Vol. 2, Issue 2, pp. 64–70). Iterative International Publishers, Selfpage Developers Pvt Ltd. <https://doi.org/10.58532/V2S2CH8>
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2024). History and Humans: Study of the Urgency and Position of History in Human Life. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 3(1), 24–31. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v3i1.330>
- Savolainen, R. (2017). Heuristics elements of information-seeking strategies and tactics: a conceptual analysis. *Journal of Documentation*, 73(6), 1322–1342. <https://doi.org/10.1108/JD-11-2016-0144>
- Teluk Bone. (2022). *Sejarah Kabupaten Sinjai*. Youtube. <https://youtu.be/yeVfCpYAxlg?si=AUH5cE4oYzhpmWC>
- Wahyu. (2024). *Federasi Kerajaan Tellu Limpoe Dan Pitu Limpoe Menjadi Kabupaten Sinjai Sebagai Transformasi Peradaban Islam Pasca Terbentuknya Kabupaten Sinjai*. UIN Alauddin Makassar.